

IMPLEMENTASI ETIKA PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RADI AWANDI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: awandiradi91@gmail.com

Abstrak

Etika pemerintahan menjadi hal yang sering dipersoalkan setiap kali ketidakpuasan pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Persoalan timbul di kalangan masyarakat sebagai pengguna jasa (Pelayanan). Pada kaitannya dalam pembangunan aparatur pemerintah di arahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan, kedisiplinan, Pengabdian, Keteladanan dan kesejahteraan aparatur pemerintah. Sehingga secara keseluruhan makin mampu dalam mengemban amanah dan tugas sebagai seorang aparatur pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Apakah aparatur yang menjadi wajah terdepan pemerintah tentang gambaran pemerintah. Di jalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi serta diperkuat dengan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi etika pemerintahan pada kantor camat sentajo raya sudah terimplementasi namun hanya perlu peningkatan dan selalu berpedoman.

Kata Kunci : Etika dan Pemerintahan

ABSTRACT

Government ethics becomes a matter that is often disputed whenever dissatisfaction with the services provided to the community by the government. These problems always arise among the community as service users (Services). In relation to the development of government apparatus, it is aimed at improving the quality, efficiency, and effectiveness of all governance arrangements, including increasing the ability, discipline, service, example and welfare of the government apparatus. So as a whole more able to carry out the mandate and duties as a government apparatus. The purpose of this study was to determine the Implementation of Government Ethics at the Sentajo Raya Sub-District Office, Kuantan Singingi Regency. What is the apparatus that becomes the front face of the government about the picture of the government. In running the ethics of government by the government apparatus will have direct implications in the administration of government. The study was conducted at the Sentajo Raya District Office in Kuantan Singingi Regency. The research method used is qualitative research, data collection techniques are interviews and observations and reinforced with documentation. Based on the results of the study note that the implementation of government ethics at the Sentajo Raya sub-district office has been implemented but only needs improvement.

Keywords: Ethics and Government

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Suatu instansi pemerintah didirikan dengan beberapa tujuan, tujuan yang dimaksud adalah melancarkan kegiatan, pelayanan publik, dan memberikan lapangan kerja. Tujuan instansi pemerintah dapat dicapai apabila manajemen mampu mengolah, menggerakkan dan menggunakan sumber daya manusia yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Dalam suatu instansi pemerintahan sumber daya manusia yang dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun pada kenyataannya masih terjadi tindak ketidakdisiplinan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdampak pada penurunan kinerja pegawai.

Kaitannya dengan etika pemerintahan maka hal yang terkait proses penyelenggaraan pemerintahan adalah menyangkut pentingnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mentaati berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, melaksanakan hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, disamping itu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan koridor etika pemerintah perlu memberikan pelayanan terbaik khususnya dalam proses pelayanan publik, dengan demikian dapatlah dipahami bahwa konteks dalam beretika akan menjadi pedoman bagi setiap aparatur pemerintah khususnya dalam melaksanakan tugasnya.

Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik yang berlaku bagi setiap aparturnya. Etika dalam pemerintahan harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat yang harus dipedomani serta diwujudkan oleh setiap aparatur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum nilai-nilai suatu etika pemerintahan yang perlu dijadikan pedoman dan perlu dipraktekkan secara operasional antara lain: bahwa aparat wajib mengabdikan kepada kepentingan umum. Aparat adalah motor penggerak “head“ dan “heart“ bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Aparat harus berdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak (mediator), Aparat harus jujur, bersih dan berwibawa, Aparat harus bersifat diskresif, bisa membedakan mana yang rahasia dan tidak rahasia, mana yang penting dan tidak penting, dan aparat harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom.

Perlu dipahami bahwa dalam etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari.

Beberapa permasalahan etika yang ada antara lain aparat dapat dilihat yaitu belum menunjukkan sikap ramah, sopan, dan santun pada pengguna jasa pelayanan. Hal tersebut ditunjukkan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat aparat sambil bermain handphone (telepon genggam). Di samping waktu penyelesaian yang tidak pasti (tidak sesuai janji yang di sampaikan) dan berbelit-belit, Hal tersebut dirasakan kurang beretika. Selain itu masih ada pegawai yang tidak berada pada tempat kerjanya atau mejanya kosong disaat pengguna jasa membutuhkan pelayanan di samping itu sikap petugas yang kurang tanggap dan acuh tak acuh.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: **“Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi ?

Tujuan Penelitian

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan untuk mengetahui Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Secara akademis hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lanjutan yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi terhadap kinerja aparatur yaitu pelayanan publik.

Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dalam upaya untuk memecahkan suatu permasalahan Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Bagi peneliti sendiri, melalui penelitian ini dapat meningkatkan wawasan serta pengetahuan, khususnya mengenai implementasi etika pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi Negara

Kerangka Konsep Administrasi Negara

Konsep awal administrasi menurut Wildon¹, Pada tahun 1955 adalah kerja sama manusia yang di dasarkan atas pertimbangan rasional guna mencapai tujuan bersama (sesuatu yang sekedar ada dalam pikiran). Manusia memiliki potensi yang secara rasional dapat membentuk tujuan yang hendak mereka capai memiliki kesamaan. Pada bentuk kerja sama demikian, kerja sama dapat di konseptualkan sebagai administrasi. Sebagai konsep keberadaannya masih sekedar ada dalam pemikiran. Ia belum tampak sebagai hal yang konkret, dalam bentuknya maupun dalam isinya dan bagaimana kerja sama itu berlangsung.

Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua aparatur negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

¹ Prof. Dr. H. Faried Ali, S.H., M.S *“Teori dan konsep administrasi”* (Makassar : PT Rajagrafindo Persada, 2011) hlm 187

Menurut Prajudi Atmosudirdjo² adalah Administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Edward H.Litchfield, mengatakan tentang bahwa administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

Pergeseran Paradigma Administrasi

Paridigma adalah corak berfikir seseorang atau sekelompok seseorang. Menurut Thomas S. Khun, mengatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah yang di anut suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.

Nicholas Henry,³ memaparkan lima paradigma administrasi negara mengungkapkan bahwa standart suatu disiplin ilmu, seperti yang dikemukakan oleh Robert T. Golembiewski, mencakup lokus dan fokus. Fokus mempersoalkan *What of the field* atau metode dasar yang di gunakan atau cara-cara ilmiah apa yang dapat di gunakan untuk memecahkan persoalan. Sedang lokus mencakup *where of the field* atau medan atau medan atau tempat dimana metode tersebut di gunakan atau di terapkan. Berdasarkan dua kategori disiplin tersebut yaitu Lima paradigma administrasi negara adalah :

a. Paradigma 1 : di kotomi politik dan administrasi, tahun 1900-1926

Paradigma 1, dikotomi politik dalam administrasi negara Mengungkapkan bahwa politik memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedang administrasi memberikan perhatiannya pada pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan atau kehendak tersebut, Pemisahan politik dan administrasi di menefestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat dengan bantuan eksekutif yang bertugas mengimplementasikan kehendak tersebut, dalam paradigma ini hanya locus saja yaitu *government bureaucracy*, Tetapi fokus atau metode apa yang harus di kembangkan dalam administrasi publik kurang di bahas secara jelas dan terperinci..

b. Paradigma 2: Prinsip-Prinsip Administrasi, tahun 1927-1937

Pada masa ini memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut di tuangkan dalam apa yang di sebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizaing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*) yang menurut mereka dapat di terapkan dimana saja atau bersifat universal sedangkan locus dari tidak pernah di ungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku di setiap organisasi pemerintah.

c. Paradigama 3: Administrasi Negara sebagai ilmu politik, Tahun 1950-1970

Defenisi fase ketiga ini dimana locusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedang fokusnya menjadi kabur karena prinsip prinsip administrasi mengandung banyak kelemahan.

d. Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Pada tahun ini administrasi negara telah menggunakan paradigma ilmu administrasi, dalam pradgma ini prinsip-prinsip manajemen di kembangkan secara ilmiah dan mendalam. Perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi modern

² *Ibid*, hlm 32 - 34

³ Yeremias T.Keban, *Op. Cit.*, hlm 31-33

seperti metode kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dsb merupakan fokus tetapi tidak lokus.

e. Paradigma 5 : Administrasi negara sebagai administrasi negara, tahun 1970-Sekarang.

Sejak tahun 1970, Paradigma ini memiliki lokus dan fokus yang jelas, fokus paradigma tersebut adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik; sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah kepentingan publik.

Ruang Lingkup Administrasi Negara

Sebegitu luar cakupan ilmu administrasi negara sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek materialnya negara, yaitu antara lain : Ilmu Pemerintahan, Ilmu politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara itu sendiri⁴ Dengan demikian ruang lingkup administrasi negara adalah sebagai berikut :

- a. Bidang hubungan, pariwisata dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis oleh pakar pemerintahan, meliputi : administrasi pemerintahan pusat, administrasi pemerintahan daerah, administrasi pemerintahan kecamatan, administrasi pemerintahan kelurahan, administrasi pemerintahan desa, administrasi pemerintahan kotamadya, administrasi pemerintahan kota administratif, administrasi departemen, administrasi departemen, dan administrasi non-departemen.
- b. Bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu politik, meliputi : Administrasi politik luar negeri, administrasi politik dalam negeri. Administrasi partai politik, posisi masyarakat LSM, dan administrasi kebijakan pemerintah, policy, wisdom, kondisi, peran pemerintah.
- c. Bidang Peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar ilmu hukum tata negara, meliputi : landasan konstitusional, dan landasan operasional.
- d. Bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh pakar ilmu negara, meliputi : tugas dan kewajiban negara, hak dan kewenangan negara, tipe dan bentuk negara. Fungsi dan prinsip negara. Unsur-unsur negara, tujuan negara dan tujuan nasional.
- e. Bidang pemikiran hakiki yang banyak di tulis oleh pakar ilmu filsafat, meliputi : etika administrasi publik, estetika administrasi publik, cinta, rasa, karsa administrator, logika administrasi publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hukum administrasi negara dan hakikat administrasi negara.
- f. Bidang Ketatalaksanaan yang banyak di tulis oleh pakar ilmu administrasi publik. Meliputi: administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, administrasi kepegawain, administrasi kemiliteran, administrasi kepolisian, administrasi perpajakan, administratif pengadilan, administrasi kepenjaraan, dan administrasi perusahaan.

Unsur Administrasi Negara

Unsur administrasi negara menurut Inu Kencana Syafii adalah :

a. Manajemen Publik.

Menurut John D. Millet⁵ manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam bentuk formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

⁴ Inu Kencana Syafii, *Op. Cit.*, hlm 27

⁵ *Ibid*, hlm 49

Dan kepublikan dipandang sebagai kunci dalam memahami perilaku organisasi dan manajemen disemua organisasi, tidak hanya organisasi pemerintahan.

b. Organisasi Publik.

Menurut James D. Mooney, organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi terbesar dimanapun sudah barang tentu organisasi publik yang mewadai seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara. Oleh karena itu, organisasi publik mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) dibidang politik, administrasi, pemerintahan dan hukum serta terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, serta melayani kebutuhannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan dan menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

Jadi organisasi publik sering kita lihat pada bentuk organisasi pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintahan. Istilah birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi ideal (yang disebut birokrasi dan orang-orang birokrat ini) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan ditetapkan oleh instansi pemerintah.

c. Komunikasi pemerintah

Secara konseptual komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses rangkain penataan, berupa penyampai warta, berita ataupun informasi, baik berupa suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak) lain untuk suatu tujuan tertentu.

d. Informasi Pemerintahan

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah di proses. Informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma ke dalam informasi tersebut. Informasi pemerintahan yang benar dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan di perkirakan terjadi.

e. Kpegawain.

Administrasi kepegawai adalah keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumberdaya manusia dalam organisasi. Segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian, atau aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu kepadanya secara seimbang.

f. Perbekalan

Cabang ilmu administrasi perbekalan mempelajari segenap rangkai kegiatan penataan, pengadaan, pencatatan, pengaturan pemakaiin, pemiliharaan, dan penyingkiran benda dalam kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen

Pengertian Manajemen

Secara etimologi, management (di indonesia di terjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata manus (tangan) dan agere (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata manage (bahasa inggris) berarti mengurus atau managiere (bahasa latin) yang berarti melatih.⁶

⁶ *Loc. Cit*

Menurut George Terry, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah di tentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen atau disebut juga sebagai unsur-unsur manajemen menurut Usman Effendi,⁷ ada 4 (Empat), yaitu :

- a. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang di tentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah di tetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar.
- c. Kepemimpinan (*Learning or Actuating*) berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. Kepemimpinan termasuk didalamnya pergerakan (*Actuating*) yaitu melakukan pergerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya.
- d. Pengendalian (*Controlling*) merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak kearah tujuan.

Asas Manajemen

Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan.⁸ Menurut Henry Fayol⁹ asas umum manajemen adalah :

- a. Asas Pembagian Kerja : asas ini sangat penting, karena adanya "*Limit Factors*", artinya adanya keterbatasan-keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu : (1) Keterbatasan waktu, (2) keterbatasan dalam pengetahuan, (3) Keterbatasan dalam kemampuan, (4) keterbatasan dalam perhatian.
- b. Asas wewenang dan tanggung jawab : menurut asas ini perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab. Wewenang (*authority*) menimbulkan hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan.
- c. Asas Disiplin, Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, perintah atasan harus di hormati, dipatuhi, dan dilaksanakan sepenuhnya.

⁷ *Ibid*, hlm 18

⁸ Drs. H. Melayu. S.P Hasibuan, "*Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*" (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) hlm 10

⁹ *Ibid*, hlm 8

- d. Asas Kesatuan Perintah, Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan tanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula.
- e. Asas kesatuan Jurusan atau Arah, Setiap orang (kelompok) bawahan hanya mempunyai satu rencana satu tujuan, satu perintah satu atasan, supaya mewujudkan satu kesatuan arah, kesatuan gerakan dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama.
- f. Asas Kepentingan Umum diatas kepentingan Pribadi : setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (Organisasi) diatas kepentingan pribadi.

Organisasi

Pengertian Organisasi

Menurut KBBI¹⁰, organisasi adalah kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut James D. Mooney¹¹, organisasi adalah sebagai bentuk seperti perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan suatu tujuan bersama.

Menurut Dwight Waldo, organisasi adalah sebagai suatu struktur dan kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Unsur – Unsur Organisasi

Menurut Melayu S.P Hasibuan, unsur-unsur organisasi adalah :

- a. Manusia, artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pimpinan dan ada yang dipimpin.
- b. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.
- c. Tujuan, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan organisasi yang ingin di capai.
- d. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada, jika ada pekerjaan yang akan di kerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.

Bentuk-Bentuk Organisasi

Menurut Wursanto¹², ada 8 Bentuk Organisasi sebagai berikut :

- a. Bentuk Organisasi Staf
- b. Bentuk Organisasi Lini.
- c. Bentuk Organisasi Fungsional
- d. Bentuk Organisasi Fungsional dan Lini
- f. Bentuk Organisasi Lini dan Staff
- g. Bentuk Organisasi Panitia

Perilaku Organisasi

¹⁰ <https://kbbi.web.id/manajemen> diakses pada tanggal 25 Nopember 2018

¹¹ Inu Kencana Syafie, *Op. Cit.*, hal 51-53

¹² Drs. Ig. Wursanto. *"Dasar-Dasar Ilmu Organisasi"*. (Yogyakarta: Andi, 2003)hlm 81

Menurut Wursanto¹³, mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Mempelajari perilaku organisasi, baik secara individu maupun secara kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, tetapi mempelajari bagaimana para anggota itu berperilaku. Tetapi mempelajari bagaimana para anggota organisasi itu berperilaku. Mempelajari bagaimana para anggota organisasi berperilaku berarti mempelajari perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku yang berbeda.

Konsep Implementasi

Pengertian Implementasi

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”¹⁴.

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”¹⁵.

Dari berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Teori-Teori Implementasi

Ada beberapa teori implementasi diantaranya :

a) Model Implementasi Oleh George C. Edward III

Model Implentasi yang bersifat top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *direct and indirect impact on implementation*. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu : 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi.¹⁶

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustino), *the are for critical factories to policy implementation they are : “communication, resources, disposition, and bureauratic structure”*.¹⁷

¹³ *Ibid*, hlm 275

¹⁴ Purwanto dan Sulistyastuti, “*Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*” Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm 21.

¹⁵Agostiono,“*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*”. <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 12 Maret 2019

¹⁶ Edward III, George C (edited), *Op. Cit.*, hlm 149-154

¹⁷ Agostiono, “*Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*”. <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses 12 Maret 2019, hlm 154.

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencakup : 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup : 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.¹⁸

Konsep Etika Pemerintahan

Pengertian Etika

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*. Dalam bentuk tunggalnya berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya *ta etha* yang berarti adat kebiasaan. Kata inilah menurut Bertens¹⁹, yang melatarbelakangi munculnya kata *ethica* yang di gunakan Aristoteles untuk menunjukkan *filsafat Moral*. Sedangkan istilah 'Moral' berasal dari bahasa Latin *Mos* (tunggal) atau *mores* (jamak) yang sama artinya dengan *ethica* dalam bahasa Yunani yaitu kebiasaan atau adat. Karena itulah, maka istilah etika kadang-kadang di pertukarkan penggunaannya dengan istilah moral atau keduanya sering dipakai untuk saling menjelaskan. Misalnya, yakni perbuatan yang sesuai dengan kodrat, harkat dan martabat manusia terlepas dari kedudukan dan peranannya dalam kehidupan sosial. Sedangkan perbuatan yang tidak etis atau immoral berarti perbuatan buruk secara moral.

Pembinaan Kompetensi Etik Aparatur Pemerintah

Menurut Dadang Sufianto²⁰, Pembinaan kompetensi etik aparatur pemerintah setidaknya-tidaknya dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu edukasi, penciptaan iklim etis dan keteladanan para pimpinan instansi pemerintah. Kegiatan edukasi diarahkan pada pribadi-pribadi aparatur pemerintah, sedangkan penciptaan iklim etis pada seluruh instansi pemerintah, sedangkan kegiatan penciptaan iklim etis diarahkan pada seluruh instansi pemerintahan (Mikro) dan seluruh pihak terkait dalam skala nasional/daerah (Makro) dan keteladanan para pimpinan instansi pemerintah di perlukan untuk menunjang keduanya.

Kode Etik Pegawai

Sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

¹⁸ Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). "*Teori dan Proses Kebijakan Publik*"., Media Pressindo Yogyakarta, 2002, hlm 21.

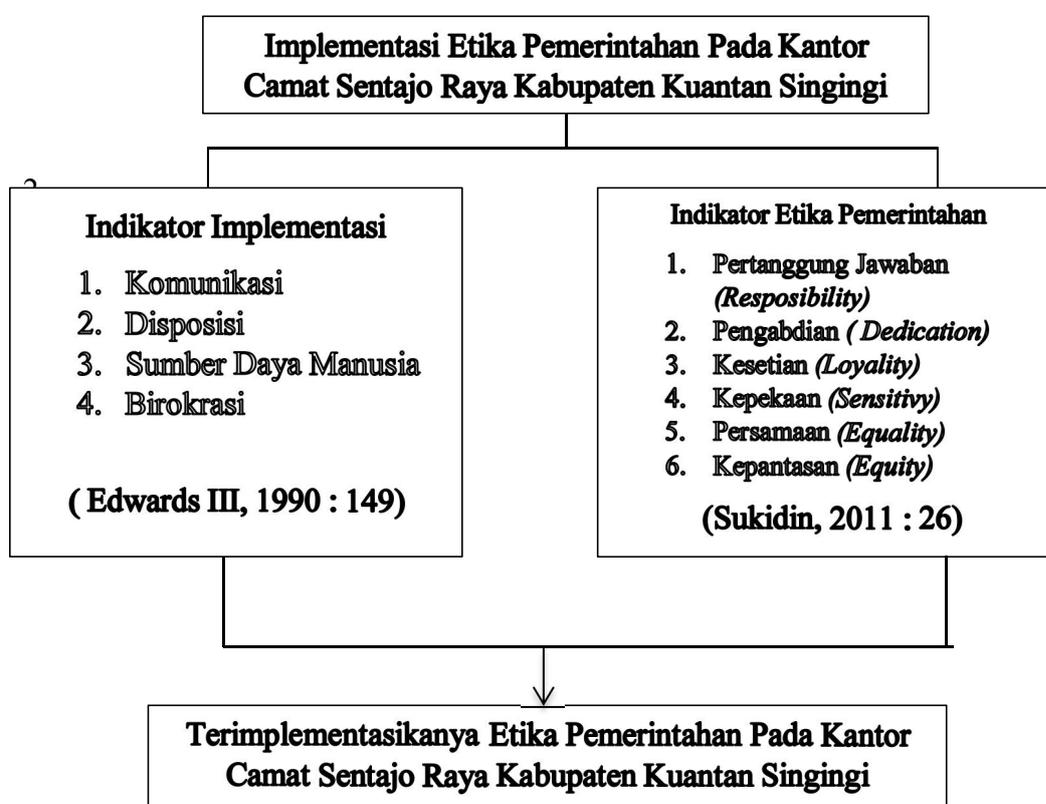
¹⁹ Dadang Sufianto, *Op. Cit.*, hlm 34

²⁰ *Ibid*, hlm 202 - 203

Menurut Soewargono²¹, Setiap pegawai wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan wajib memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetian dan ketaatan kepada pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Untuk menjamin agar setiap pegawai selalu berupaya terus meningkatkan kesetian, ketaatan, dan pengabdianya tersebut, maka di tetapkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai, baik di dalam maupun diluar dinas.

Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



Hipotesis kerja

Menurut Sugiyono²², Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan sebagaimana diketahui bahwa implementasi etika pemerintahan pada kantor camat sentajo raya belum terimplementasi berdasarkan pengamatan dan beberapa urusan yang sering kali memakan waktu.

²¹ Dr. Muh. Kadarisman,SH., M.Si, "Manajemen Aparatur Sipil Negara" (Depok :Rajawali Pers, 2018) hlm 222

²² Prof. Dr. Sugiyono, "Metode Penelitian Administrasi" (Alfabeta:Bandung, 2012) hlm 70

Defenisi Operasional

Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah maka penulis memberikan batasan definisi operasional antara lain :

Indikator Implementasi

Komunikasi

Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan.

Sumber daya

Sumber Daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan melalui beberapa elemen yaitu : Staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi yaitu yang dicermati pengangkatan birokrat, insentif.

Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Indikator Etika Pemerintahan

Pertanggung jawaban (Responsibility)

Asas ini begitu menyangkut hasrat petugas tentang rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Petugas administrasi pemerintahan harus mempunyai hasrat besar untuk melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif, sepenuh kemampuan, dan dengan cara paling memuaskan.

Pengabdian (Dedication)

Merupakan suatu keinginan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan , dengan sepenuh hati, tidak setengah jadi dan tanpa pamrih, sehingga menghasilkan output pekerjaan yang memuaskan.

Kesetian (Loyalty)

Salah satu kesetian adalah loyalitas terhadap pekerjaan melalui pimpinan dan maupun rekan kerja yang terpenting pada aturan dan konstitusi yang berlaku untuk mencapai tujuan bangsa.

Kepekaan (Sensivity)

Merupakan asas yang mencerminkan kemaun dari seorang petugas untuk mempersiapkan diri untuk perkembangan yang baru, situasi tertentu, sehingga ada upaya memperbaiki diri dalam meningkatkan dengan upaya pendidikan maupun latihan, dll

Persamaan (*Equality*)

Memberikan pelayanan prima dan maksimal guna kepentingan umum ialah memberikan perlakuan yang adil, perlakuan ini dicontohkan dengan perlakuan yang sama, tidak membedakan, tanpa memandang hubungan keluarga dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sehingga tujuan dari pelayanan itu terwujud.

Tabel 2.1 : Indikator Item Penilain Tentang Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

Variabel	Indikator	Item Penilain	Ukuran
Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi	Pertanggung jawaban (<i>Responsibilit</i>)	1. Melaksanakan Fungsi 2. Jadwal masuk/pulang 3. Jangka Waktu	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
	Pengabdian (<i>Dedication</i>)	1. Peduli dan tanggap 2. Ramah dan Sopan 3. Komitmen	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
	Kesetiaan (<i>Loyalty</i>)	1. Membangun kesadaran 2. Mengikuti Aturan 3. Mengikuti arahan pimpinan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
	Kepekaan (<i>Sensitiviy</i>)	1. Mencerminkan kemaun 2. Pendidikan dan latihan	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
	Persamaan (<i>Equality</i>)	1. Tidak Membedakan 2. Hubungan Keluarga 3. Mengutamakan Kepentingan umum	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana
	Kepantasan (<i>Equity</i>)	1. Profesionalitas 2. Berprilaku Jujur	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana Tidak Terlaksana

Sumber : Olahan Peneliti 2019

Ring Penilain indikator item penilain

- Terlaksana : Semua indikator terlaksana
- Cukup Terlaksana : Sebagian Indikator terlaksana
- Kurang Terlaksana : Sebagian besar indikator tidak terlaksana
- Tidak Terlaksana : Semua Indikator Tidak Terlaksana
- Tidak Terlaksana : Semua Indikator tidak terlaksana

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Informan

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasi PMD	1
4.	Kasi Pemerintahan	1
5.	Kasi Trantib	1
6.	Kasubbag Umum	1
7.	Kasubbag Keuangan	1
8.	Kasubbag Program	1
9.	Staff	6
Jumlah		14

Sumber : Olahan Data Peneliti 2019

Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh melalui kuesioner dengan para responden dan pengamatan langsung di lokasi penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, catatan dan dokumen atau litelatur, serta bacaan lain yang dijadikan teori dalam menganalisa data yang ditentukan.

Fokus Peneletian

Sehingga peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi tujuan dari penelitian dan dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Adapun Fokus penelitian ini yaitu berfokus pada implementasi etika pemerintahan di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Sentajo Raya Jalan Soekarno - Hatta Km. 06 Koto Sentajo.

Alasan peneliti memilih kantor tersebut di duga belum terlaksannya etika pemerintahan karena masih banyak para pegawai yang masih lalai dan tidak tau etika pemerintahan.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*) teknik ini digunakan untuk menjangkau data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara yang terapkan dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini meliputi tape recorder dan catatan-catatan kecil dari peneliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian adalah:
2. Observasi, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Kemudian observasi dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan dengan mengumpulkan data primer yang diperlukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang telah ditetapkan yaitu Kantor Kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi yang di observasi oleh peneliti adalah kegiatan Kantor Kecamatan sentajo raya kabupaten kuantan singingi.
3. Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis.

Metode Analisis Data

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan secara sistematis dan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada keterangan hasil wawancara kepada informan dan hasil observasi peneliti dengan 6 indikator dengan 16 item penilai yang digunakan peneliti dan dapat disimpulkan jawaban informan tentang implementasi etika pemerintahan pada kantor camat sentajo raya kabupaten Kuantan Singingi. Dimana indikator yang menjadi penilai pada variable ini menghasilkan semua indikator sudah terlaksana dan cukup terlaksana dari enam indikator yang ada.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplemetasi. Hal ini ditandai dengan diraihnya terbaik II dalam hal evaluasi kinerja pegawai pada kantor camat sentajo raya tahun 2018 dari 6 indikator penilain peneliti, maka di dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 5.5 : Capain /Hasil Wawancara Peneliti

No	Indikator	Item Penilain	Capain/Hasil
1	Pertanggung Jawaban (Responsibility)	1. Melaksanakan Fungsi	Cukup Terlaksana
		2. Jadwal Masuk/Pulang	Cukup Terlaksana
		3. Jangka Waktu	Cukup Terlaksana
2	Pengabdian (Dedication)	1. Peduli Dan Tanggap	Sudah Terlaksana
		2. Ramah Dan Sopan	Sudah Terlaksana
		3. Komitmen	Sudah Terlaksana
3	Kesetian (Loyalty)	1. Membangun Kesadaran	Cukup Terlaksana
		2. Mengikuti Aturan	Sudah Terlaksana
		3. Mengikuti Arahan Pimpinan	Sudah Terlaksana
4	Kepekaan (Sensitiviy)	1. Mencerminkan Kemaun	Cukup Terlaksana
		2. Pendidikan dan Latihan	Sudah Terlaksana
5	Persamaan (Equality)	1. Tidak Membeda-bedakan	Sudah Terlaksana
		2. Hubungan Keluarga	Cukup Terlaksana
		3. Mengutamakan Kepentingan Umum	Cukup Terlaksana
6	Kepantasan (Equity)	1. Profesionalitas	Cukup Terlaksana
		2. Berprilaku Jujur	Sudah Terlaksana

Dari 6 Indikator dan 16 Item penilain peneliti maka menghasikan 8 Item Sudah terlaksana dan 8 item cukup terlaksana. Selain itu peneliti juga menemukan hasil observasi di lapangan berupa dokumentasi yang menunjukkan fakta bahwa Implementasi Etika Pemerintahan Pada Kantor Camat Sentajo Raya Kabupaten Singingi yang dinyatakan sudah terimplementasi

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, bahwa implementasi etika pemerintahan pada kantor camat sentajo raya kabupaten Kuantan singingi sudah terimplementasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kegiatan administrasi maupun pelayanan yang diberikan tidak terjadi kendala yang begitu signifikan di samping itu kantor camat sentajo pernah meraih terbaik II dalam evaluasi kinerja pegawai pada tahun 2018.

Saran

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan peneliti dilapangan, maka peneliti memberikan saran sebagai masukan terhadap implementasi etika pemerintahan pada kantor camat sentajo raya kabupaten Kuantan singing yaitu :

1. Dalam kedisiplinan pegawai diharapkan dapat memenuhi dan mentaati aturan yang dikeluarkan pemerintah maupun instansi terkait.
2. Bekerjalah dengan sopan dan berbahasa yang santun serta mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Selalu memberikan pelayanan yang optimal dan maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan tanpa memandang suku,ras dan agama.
4. Selalu laksanakan kegiatan peningkatan kinerja dengan kegiatan workshop serta pendidikan dan latihan kepada setiap pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali , Faried ,2011 *Teori dan Konsep Administrasi*, Makassar ,PT. Rajagrafindo Persada
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, 2010, Jakarta,Rajawali Press,
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. 2008 “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*”*Universitas Pepabari*, Makassar
- Chander dan Plano, 2006, *Strategic Marketing*, Eighth Edition. McGraw Hill, New York
- Edward III, George C (edited), 1990 *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al.
- Fattah, Nanang 2008 *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, Remaja Rosdakarya,
- Gie, The Liang, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Liberty
- Hasibuan, 2010, *Organisasi dan motivasi dasar peningkatan produktivitas*. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Hariyanto, 2000, *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*, Bandung ,PT. Remaja Rosdakarya,
- Husaini, Usman, 2006, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara,
- Kadarisman, 2018, *Manajemen Aparatur Sipil Negara*, Depok ; Rajawali Pers, *Cetakan 1*.
- Kencana Syafiie, Inu ,2011, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, Reneka Cipta

- Kencana Syafiie, Inu, 2010 *Ilmu Administrasi Publik*, . Jakarta, Reneka Cipta
- Keban, T. Yeremias, 2014 *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Edisi Ke tiga, Yogyakarta, Alfabeta.
- Kencana Syafiie, Inu, 2003 *Sistem Admnistrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Reneka Cipta,
- Moleong, 2010 , *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung, Rosdakarya.
- Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno)2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta,
- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Purwanto dan Sulistyastuti 1991 , *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta,
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, 1986 *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis,
- Rusyan, Tabrani, 2010 *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,
- Sagala, Syaiful,2009 *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung,Alfabeta,
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung, Alfabeta.
- Sufianto, Dadang, 2016. *Etika Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Ke satu, Bandung, Alfabeta
- Sukidin, Damai darmadi, 2011, *Administrasi Pelayanan Publik*, Gramedia, Jakarta, Alfabeta.
- Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. . Yogyakarta, Andi
- Peraturan Perundang-undangan**
 Tap MPR-RI No.VI/MPR/2001 *tentang etika kehidupan berbangsa, arah kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa (termasuk etika pemerintahan)*
- Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 *tentang pembinaan korps dan kode etik Pegawai*
- UU No.5 Tahun 2014 Pasal 6 *tentang ASN*

Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Website :

[http:// www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), diakses pada tanggal 12 Nopember 2018

[http:// kbbi.web.id/manajemen](http://kbbi.web.id/manajemen), diakses pada tanggal 25 Nopember 2018

[http:// elkanagori.blogspot.co.id/2014](http://elkanagori.blogspot.co.id/2014) , diakses pada tanggal 02 Desember 2018